



## Manajemen dan Organisasi BK: Fondasi Pelaksanaan Layanan yang Efektif di Sekolah

Adhelea Satsabhila<sup>1\*</sup>, Syakira Zahira Shofa<sup>2</sup>, Riska Dwi Maretta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Alamat: Jalan Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213

Korespondensi penulis: [24010014101@mhs.unesa.ac.id](mailto:24010014101@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *The management and structure of Guidance and Counseling services in schools are crucial elements to ensure that the service runs well, is planned, and is sustainable. This article discusses the role of planning, organizing, implementing, and supervising in Guidance and Counseling program management, as well as how organizational structure, available facilities, and cooperation between school employees influence the achievement of service objectives, such as improving counseling skills, student discipline, and service integration within the school education system. The results of the literature study indicate that the success of Guidance and Counseling services is highly dependent on: (1) the existence of clear program planning that is in accordance with student needs; (2) organizational structure and task distribution that supports consistency in implementation; (3) support from school facilities and policies; and (4) the existence of continuous monitoring and evaluation for program improvement. Suggestions given include strengthening the professional capabilities of Guidance and Counseling teachers, standardizing service program formats, and increasing cooperation between all relevant parties in schools to ensure that Guidance and Counseling services are responsive and have a positive impact on student development.*

**Keywords:** BK Management, BK Organization, Guidance and Counseling, School

**Abstrak.** Pengelolaan dan struktur layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan elemen krusial untuk memastikan bahwa layanan tersebut berjalan dengan baik, terencana, dan berkesinambungan. Artikel ini membahas peran dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam manajemen program Bimbingan dan Konseling, serta bagaimana struktur organisasi, sarana yang tersedia, dan kerja sama antar pegawai di sekolah berpengaruh pada pencapaian tujuan layanan, seperti peningkatan kemampuan konseling, disiplin siswa, dan integrasi layanan dalam sistem pendidikan di sekolah. Hasil dari studi literatur menunjukkan bahwa kesuksesan layanan Bimbingan dan Konseling sangat tergantung pada: (1) keberadaan perencanaan program yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa; (2) struktur organisasi dan distribusi tugas yang mendukung konsistensi dalam pelaksanaan; (3) dukungan dari fasilitas dan kebijakan sekolah; serta (4) adanya pemantauan dan evaluasi yang terus menerus untuk perbaikan program. Saran yang diberikan antara lain adalah memperkuat kemampuan profesional guru Bimbingan dan Konseling, menyamakan standar format program layanan, dan meningkatkan kerja sama antara semua pihak terkait di sekolah untuk memastikan bahwa layanan Bimbingan dan Konseling responsif dan berdampak positif pada perkembangan siswa.

**Kata kunci:** Manajemen BK, Organisasi BK, Bimbingan dan Konseling, Sekolah

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir. Dalam proses ini, sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi yang mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung perkembangan

psikologis dan sosial para peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan layanan bimbingan dan konseling (BK) menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem pendidikan sekolah.

Layanan bimbingan dan konseling memiliki fungsi penting dalam membantu peserta didik memahami diri, mengembangkan potensi, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi selama masa proses pendidikan. Namun, efektivitas layanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh bagaimana layanan tersebut dikelola dan diorganisasikan. (Sodik, 2022) menegaskan bahwa pentingnya manajemen dalam bimbingan dan konseling, karena manajemen merupakan suatu proses aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam suatu sistem organisasi dengan menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian integral dari program pendidikan/sekolah maupun luar sekolah. Oleh karena itu, peran bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah memiliki kedudukan yang penting, dan salah satu peran penting bimbingan dan konseling adalah terkait dengan manajemen, khususnya manajemen bimbingan dan konseling pendidikan/sekolah maupun luar sekolah.

Pada praktiknya, pelaksanaan layanan BK di sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain belum optimalnya pengorganisasian layanan, kurang jelas pembagian tugas dalam struktur BK, serta lemahnya koordinasi antara guru BK dengan unsur sekolah lainnya. (Hanafi, 2017) Kegiatan manajemen sering sekali dijumpai sebagai problematik yang muncul dalam dunia manajemen bimbingan dan konseling. Seperti perencanaan program yang tidak matang, kurangnya aktivitas layanan yang tepat sasaran, program yang tidak berlandaskan pada assessment, kegiatan evaluasi supervise yang tidak dilakukan. Hal ini akan berdampak pada program BK yang tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Manajemen dan organisasi BK yang baik akan menjadi fondasi utama bagi terlaksananya layanan BK yang efektif. Pengorganisasian yang jelas akan membantu menentukan peran, tanggung jawab, dan alur kerja layanan BK di sekolah. Hal ini sejalan dengan (Melilia et al., 2024) yang menyatakan bahwa pengorganisasian yang tepat dalam manajemen BK berkontribusi langsung terhadap keterlaksanaan layanan BK secara sistematis dan terarah. Dan struktur organisasi membawa konsekuensi berubahnya perilaku dan nilai karakteristik orang-orang yang berada dalam struktur organisasi tersebut (Saharudin et al., 2023).

Secara yuridis, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014. Regulasi ini

menegaskan bahwa layanan BK harus dikelola secara profesional dan terintegrasi dalam sistem pendidikan sekolah. (Zamroni dan Rahardjo, 2015) Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjadi acuan baru pelaksanaan tata kelola bimbingan dan konseling mulai dari *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading* dan *controlling*.

Dengan demikian, manajemen dan organisasi bimbingan dan konseling merupakan komponen fundamental dalam menjamin keterlaksanaan layanan BK secara sistematis dan berkelanjutan di sekolah. Dengan pengelolaan dan pengorganisasian yang tepat, layanan BK diharapkan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual bagaimana manajemen dan organisasi BK berperan dalam mendukung efektivitas layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan sekolah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Manajemen bimbingan dan konseling (BK) dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan dalam mengelola layanan BK yang mencakup tahap perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta pengendalian guna mewujudkan layanan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah. Dalam sistem pendidikan, manajemen BK memiliki posisi strategis karena layanan bimbingan dan konseling berkontribusi penting dalam mendukung perkembangan peserta didik, baik pada aspek akademik, kepribadian, sosial, maupun perencanaan karier (Sodik, 2022). Pengelolaan yang terstruktur dan sistematis memungkinkan program BK dirancang sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik serta dijalankan secara terarah dan berkesinambungan (dari Kemampuan et al., 2018).

Keberhasilan manajemen BK sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas yang tepat. Pengorganisasian dalam layanan BK berfungsi untuk mengatur peran dan tanggung jawab seluruh personel yang terlibat agar layanan dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinasi (Meliala et al., 2024). Struktur organisasi yang baik juga berdampak pada perubahan perilaku kerja dan nilai profesional personel di dalamnya, sehingga mendukung keterlaksanaan layanan BK secara efektif (Saharudin et al., 2023).

Dalam praktiknya, lemahnya manajemen dan organisasi BK dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti perencanaan program yang tidak matang, layanan yang tidak berbasis asesmen, serta kurangnya supervisi dan evaluasi. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya layanan BK dalam menjawab kebutuhan peserta didik (Hanafi, 2017). Oleh karena itu, diperlukan manajemen BK yang terencana dan terstruktur sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Secara yuridis, penyelenggaraan layanan BK di sekolah diatur dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya tata kelola BK yang profesional dan terintegrasi dalam sistem pendidikan sekolah. Regulasi ini menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi manajemen BK, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, agar layanan BK berjalan sesuai tujuan pendidikan nasional (Zamroni & Rahardjo, 2015).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literature review yang berpusat pada pemeriksaan detail dari tulisan di jurnal atau artikel yang membahas topik terkait dengan isi dari tulisan ini. Metode ini meliputi mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyatukan data dari berbagai sumber informasi. Ini adalah teknik yang dipakai untuk mengkaji beberapa tulisan. Adanya referensi dari jurnal dan buku memudahkan pemahaman materi secara lebih mendalam. Sumber data yang digunakan pada penelitian merupakan sumber yang relevan dengan objek yang ada pada penelitian ini (Habsy et al., 2023)

Metode ini menekankan pada pengertian yang menyeluruh dan berarti. Teknik ini juga mencakup penjabaran data dan langkah kerja yang teratur. Pada bagian ini, mengurai data dari jurnal ilmiah yang diperoleh merupakan salah satu upaya untuk menguji dan menafsirkan data kualitatif dengan alur yang jelas. Dengan berbagai literatur yang relevan dengan persoalan yang dibahas, maka selanjutnya dilakukan pengelompokan dan peringkasan agar dapat dikaji sehingga menghasilkan substansi dari sumber literatur. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis dan mengkaji sehingga dapat Menyusun konsep Manajemen Bimbingan dan Konseling (Sumarni & Yakub, n.d.).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini dipaparkan hasil penelitian beserta pembahasannya yang berfokus pada manajemen dan organisasi Bimbingan dan Konseling (BK) sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Manajemen dan organisasi Bimbingan dan Konseling (BK) merupakan aspek fundamental yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Layanan BK tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep manajemen BK, tujuan, fungsi, prinsip, serta pengorganisasian BK menjadi hal yang penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan. Pembahasan pada bagian ini menguraikan secara sistematis konsep manajemen dan organisasi BK, mulai dari definisi, tujuan, fungsi, prinsip, hingga peran personalia dan tantangan inovatif yang

dihadapi, sebagai landasan untuk mewujudkan layanan BK yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di sekolah.

## **Manajemen Bimbingan dan Konseling**

### **1. Definisi Manajemen Bimbingan dan Konseling**

Manajemen Bimbingan dan Konseling (BK) didefinisikan sebagai perpaduan antara keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola berbagai sumber daya pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal melalui layanan BK. Sumber daya yang dikelola mencakup unsur manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, peralatan, metode kerja, strategi layanan, pengelolaan waktu, serta sistem informasi. Dalam konteks sekolah, sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan BK meliputi kepala sekolah, koordinator BK, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, serta tenaga administrasi. Agar layanan BK berjalan efektif, diperlukan dukungan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional, kondisi keuangan sekolah yang mencukupi, ketersediaan ruang khusus BK, pemanfaatan teknologi informasi untuk e-counseling serta pengelolaan data, dan penerapan pendekatan eklektik yang memperhatikan aspek sosial budaya serta perkembangan psikologis peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, konselor dituntut untuk mampu merancang, mengoordinasikan, melaksanakan, serta menilai seluruh kegiatan bimbingan dan konseling secara sistematis. Perencanaan yang matang menjadi dasar penting untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan layanan BK sekaligus memudahkan proses pengendalian dan penilaian kegiatan. Secara ringkas, manajemen BK di sekolah mencakup tahapan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan (monitoring), dan evaluasi (dari Kemampuan et al., 2018).

### **2. Tujuan Manajemen Bimbingan dan Konseling**

#### **a. Mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan BK**

Manajemen BK membantu memastikan program berjalan efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi. Hal ini meliputi pemanfaatan sumber daya seperti SDM, sarana-prasarana, dan waktu secara optimal.

#### **b. Mengetahui dan meningkatkan kualitas program BK**

Evaluasi berkala memungkinkan pemantauan tingkat efisiensi dan efektivitas, mengenali layanan yang belum optimal, serta menyusun strategi pengembangan ke depan.

#### **c. Menunjang perkembangan dan karakter siswa**

MBK dirancang untuk membantu siswa mengembangkan potensi, meningkatkan karakter, meningkatkan motivasi belajar, dan prestasi akademik.

d. Memberikan dukungan struktural dan sistematis pada layanan BK

MBK menyusun program yang terstruktur (melalui perencanaan, pembagian tugas, dan pemantauan) agar layanan BK lebih sistematis dan terarah.

e. Mengatasi hambatan lingkungan dan kelembagaan

Usaha seperti pemenuhan sarana-prasarana dan adaptasi terhadap kebutuhan sistem sekolah merupakan bagian dari tujuan manajerial untuk keberhasilan BK.

### 3. Fungsi Manajemen Bimbingan dan Konseling

Menurut Handoko (1997) fungsi manajemen adalah: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Koordinator BK yang merupakan pengurus dan pengurus BK sekolah, menggunakan fungsi-fungsi manajemen tersebut saat melakukan kegiatan BK di sekolah.

a. Fungsi perencanaan (planning).

Koordinator BK di sekolah bertanggung jawab menetapkan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu serta merumuskan berbagai kegiatan BK yang diperlukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi organisasi (organization).

Pada tahap ini, koordinator BK menyusun dan mengelompokkan kegiatan-kegiatan utama, menentukan prioritas pelaksanaan, serta mendelegasikan tugas dan tanggung jawab kepada pihak terkait, seperti guru BK maupun wali kelas, agar kegiatan dapat berjalan secara efektif.

c. Fungsi pelaksanaan (actuating).

Koordinator BK berperan dalam menggerakkan dan memotivasi guru BK agar mampu melaksanakan program yang telah direncanakan secara optimal sehingga tujuan layanan BK dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

d. Fungsi pengawasan (controlling).

Pengawasan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan supervisor di bidang BK, sementara koordinator BK juga menerapkan pengawasan melalui manajemen administrasi yang mencakup aspek sumber daya manusia, bahan pendukung, sarana dan prasarana, metode layanan, pendanaan, sasaran layanan (peserta didik), serta pengelolaan waktu. Selain itu, pengawasan didukung oleh pemanfaatan informasi yang relevan guna memastikan seluruh kegiatan BK berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Prinsip Manajemen Bimbingan dan Konseling**

Pelayanan Bimbingan dan Konseling meliputi: *planning, organizing, staffing, leading & controlling*. Manajemen bimbingan dan konseling merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh konselor. Menurut (Sugiyono, 2012), menyatakan prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling sebagai berikut:

- a. Efisien dan efektif, artinya kesesuaian hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal.
- b. Kepemimpinan yang efektif, artinya kepala sekolah perlu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personil sekolah secara baik.
- c. Kerjasama, artinya adanya hubungan kerjasama yang baik antar personil sekolah.
- d. Pengelolaan manajemen, sistematisa manajemen dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi.

#### **Organisasi Bimbingan dan Konseling**

##### **1. Definisi Organisasi Bimbingan dan Konseling**

Definisi organisasi adalah sistem kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang didorong oleh kesadaran orang yang ada pada organisasi secara bersama mengungkapkan bahwa organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dan bekerja atas dasar relatif, terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama. Organisasi dalam konteks program bk merupakan suatu struktur sistematis yang mengatur bagaimana layanan bimbingan dan konseling dirancang, dikelola, dan dilaksanakan.

##### **2. Tujuan Organisasi Bimbingan dan Konseling**

Tujuan pengorganisasian, organisasi adalah proses penting yang dapat membantu dalam mencapai tujuan program. Organisasi merupakan ringkasan dari bimbingan secara umumnya, dirancang berdasarkan gagasan komitmen dan kesepakatan, dan dikomunikasikan ke bawah sehingga tujuan organisasi menjadi perwujudan dari tujuan bimbingan itu sendiri. Maka, tujuannya adalah untuk memastikan semua siswa mendapatkan akses terhadap layanan yang mendukung perkembangan akademik, sosial-emosional, dan karier.

##### **3. Prinsip Organisasi Bimbingan dan Konseling**

Prinsip Khusus yang berkaitan dengan Pengorganisasian

- a. Bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

- b. Pelaksanaan bimbingan dan konseling ada di kartu pribadi (commulative record) bagi setiap siswa.
- c. Program pelayanan bimbingan dan konseling harus disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah atau madrasah yang bersangkutan.
- d. Harus ada pembagian waktu antar pembimbing, sehingga masing-masing pembimbing mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan bimbingan dan konseling.
- e. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam situasi individu atau kelompok sesuai dengan masalah yang dipecahkan dan metode yang dipergunakan dalam memecahkan masalah terkait.
- f. Dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, sekolah dan madrasah harus bekerja sama dengan berbagai pihak.
- g. Kepala sekolah atau madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah

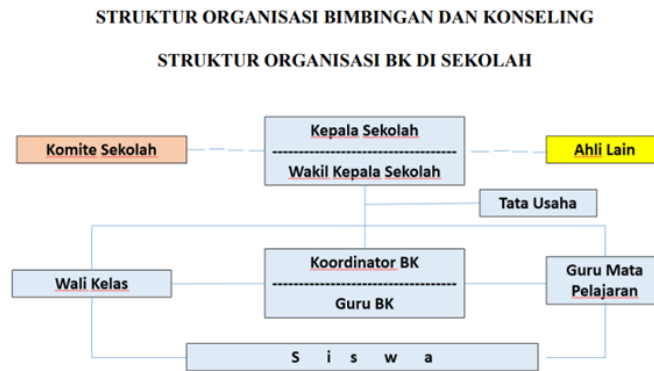
#### **4. Manfaat Organisasi Bimbingan dan Konseling**

Organisasi bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki peranan penting dalam mendukung keterlaksanaan layanan BK secara sistematis dan terkoordinasi. Pengorganisasian yang baik memberikan berbagai manfaat bagi seluruh personel yang terlibat dalam layanan BK, di antaranya sebagai berikut:

- a. Membantu setiap personel BK memahami secara jelas tugas, peran, posisi, kewenangan, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing individu.
- b. Mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan antarpersonel bimbingan dan konseling sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah.
- c. Mendorong terciptanya mekanisme kerja yang tertata, teratur, dan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Mendukung kelancaran pelaksanaan program layanan BK agar dapat berlangsung secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

#### **5. Personalia Bimbingan dan Konseling**

Secara operasional, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan oleh para guru atau konselor sekolah dibawah naungan koordinator bimbingan dan konseling. Tentunya, bimbingan dan konseling di sekolah diperlukannya kolaborasi dengan personalia dari sekolah lain. Sehingga dalam penyelenggaraannya melibatkan personalia sekolah lain agar berperan sesuai dengan batasan kewenangan dan tanggung jawabnya (Habsy et al., 2024).



**Gambar 1. Struktur Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah**

- a. Kepala Sekolah
  - a) Menyediakan dukungan kebijakan serta sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
  - b) Melakukan pembinaan dan supervisi terhadap penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah.
  - c) Menjalin kerja sama dengan pihak eksternal yang relevan guna mendukung keberhasilan program bimbingan dan konseling.
- b. Koordinator Bimbingan dan Konseling
  - a) Mensosialisasikan layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh warga sekolah.
  - b) Menyusun serta mengoordinasikan program bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan peserta didik.
  - c) Mengawasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar berjalan sesuai perencanaan.
- c. Guru Bimbingan dan Konseling
  - a) Menginformasikan dan memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.
  - b) Menyusun program layanan bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan peserta didik.
  - c) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling secara profesional dan berkelanjutan.
- d. Guru Mata Pelajaran
  - a) Mendukung pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan kelas.

- b) Membantu mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling.
- c) Merujuk peserta didik yang membutuhkan bantuan kepada guru bimbingan dan konseling.
- e. Wali Kelas
  - a) Mengumpulkan dan mengelola data peserta didik untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling.
  - b) Memantau perkembangan akademik dan nonakademik peserta didik di kelas.
  - c) Bekerja sama dengan guru bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan kepada peserta didik.
- f. Staf Tata Usaha/Administrasi
  - a) Mendukung administrasi seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah.
  - b) Membantu persiapan teknis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
  - c) Menyediakan sarana pendukung administrasi yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling.

## **6. Organisasi BK di Indonesia**

- a. IPBI (Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia). Nama organisasi yang terdahulu sebelum diubah menjadi ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia).
- b. MGBKN (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional).
- c. IMABKIN (Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia).

## **7. Tantangan dan Inovasi dalam Manajemen dan Organisasi BK**

Manajemen dan organisasi Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah saat ini dihadapkan oleh berbagai tantangan yang menuntut penyesuaian secara berkelanjutan. Salah satu permasalahan yang masih sering ditemui adalah ketidakseimbangan antara jumlah konselor atau guru BK dan peserta didik, sehingga layanan BK belum dapat menjangkau seluruh siswa secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan waktu guru BK dalam memberikan layanan yang bersifat antisipatif, penanganan, maupun pengembangan, karena harus menangani jumlah konseli yang relatif besar (Prayitno & Amti, 2015).

Selain keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban administrasi juga menjadi tantangan dalam manajemen BK. Guru BK dituntut untuk menyusun program layanan, menyusun laporan kegiatan, serta mengelola data peserta didik secara sistematis. Beban administratif yang berlebihan sering kali mengurangi kesempatan guru BK untuk fokus

pada layanan konseling secara langsung, padahal interaksi konselor dan konseli merupakan inti dari adanya pelaksanaan BK. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tuntutan agar layanan BK mampu beradaptasi dengan perubahan karakteristik peserta didik, khususnya generasi yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital.

Seiring dengan perkembangan tersebut, inovasi berbasis teknologi menjadi salah satu peluang strategis dalam pengembangan manajemen dan organisasi BK. Pemanfaatan teknologi digital, seperti konseling daring, aplikasi pendukung layanan BK, serta sistem informasi manajemen BK, dinilai dapat meningkatkan efisiensi kerja konselor dan memperluas akses layanan bagi peserta didik. Melalui dukungan teknologi, pengelolaan data konseli dapat dilakukan secara lebih terstruktur, proses pemantauan perkembangan siswa menjadi lebih sistematis, serta layanan BK dapat menjangkau peserta didik yang mengalami keterbatasan untuk mengikuti konseling tatap muka.

Namun demikian, penerapan inovasi digital dalam layanan BK tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dikelola secara cermat. Aspek etika profesi, khususnya terkait kerahasiaan konseli, perlindungan privasi, serta keamanan data peserta didik, menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan BK berbasis teknologi. Guru BK dituntut untuk tetap memegang teguh kode etik BK dalam setiap bentuk layanan, baik secara langsung maupun melalui media digital, agar kepercayaan peserta didik terhadap layanan BK tetap terjaga (ABKIN, 2019).

Sehingga manajemen dan organisasi BK perlu dikembangkan secara adaptif dan inovatif, tanpa mengabaikan prinsip profesionalisme dan etika layanan. Dukungan kebijakan sekolah, peningkatan kompetensi guru BK, serta pemanfaatan teknologi yang terencana menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan BK. Melalui pengelolaan manajemen BK yang baik, inovasi diharapkan mampu mendukung terciptanya layanan BK yang efektif, relevan dengan kebutuhan peserta didik, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Manajemen dan organisasi bimbingan dan konseling (BK) merupakan aspek fundamental dalam mendukung terlaksananya layanan BK yang efektif, sistematis, dan berkelanjutan di sekolah. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan layanan BK sangat dipengaruhi oleh penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dijalankan secara terpadu sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan.

Selain itu, kejelasan struktur organisasi BK melalui pembagian tugas, peran, dan tanggung jawab antar personil sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan kualitas layanan. Organisasi BK yang terstruktur dengan baik mendorong terjalinnya kerja sama antara guru BK, kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan tenaga kependidikan lainnya sehingga layanan BK dapat terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan sekolah.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana, kebijakan sekolah, serta pelaksanaan supervisi dan evaluasi secara berkelanjutan merupakan faktor pendukung yang tidak terpisahkan dalam optimalisasi manajemen dan organisasi BK. Oleh karena itu, penguatan manajemen dan organisasi bimbingan dan konseling melalui peningkatan profesionalitas guru BK, standarisasi program layanan, serta penguatan kolaborasi antara seluruh unsur sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan BK dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling atas arahan dan bimbingannya selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan referensi dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan artikel ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya dalam pemahaman terhadap manajemen bimbingan dan konseling.

## **DAFTAR REFERENSI**

- ABKIN. (2019). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Jakarta: Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Afandi, M. M., Putri, A. S., Tarso, T., Siswanto, D. H., & Nugroho, A. P. (2025). Management of guidance and counseling services for educational improvement in secondary schools. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 100-109.
- Almaliyah, S., & Suherman, U. (2024). Peran Sarana dan Prasarana dalam Optimalisasi Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 155-165.
- Amelisa, M., & Suhono. (2018). Supervisi bimbingan konseling dalam meningkatkan penguasaan keterampilan layanan konseling guru BK. *TAPIS: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 109–127.
- dari Kemampuan, M. B. S. D., Aditiansih, V., Anni, C. T., & Sugiharto, D. Y. P. (2018). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*

- Habsy, B. A., Sufiandi, A. C., Baktiadi, A. N., & Asmarani, E. M. (2023). Teori Perkembangan Sosial Emosi Erikson dan Perkembangan Moral Kohlberg. *TSAQOFAH*, 4(1), 217–228. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2163>
- Hanafi, A. (2017). Menejemen Organisasi Layanan Bimbingan Dan Konseling Sekolah (focus solusi terhadap problematik pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah). *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 1(02), 170-183.
- Meliala, A. K., Suherman, U., & Muhammad, F. (2024). Peran Pengorganisasian di Sekolah dalam Manejemen Bimbingan dan Konseling. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 1097-1104.
- Sabrial, J., & Hayati, R. (2025). Manajemen Bimbingan Konseling Dalam Meningkatkan Penguasaan Keterampilan Layanan Konseling Guru Bk. *Conseils: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5(1), 45-54.
- Saharudin, A., Afriza, A., & Andriani, T. (2023). Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 310-313.
- Sodik, A. (2022). Manajemen bimbingan dan konseling. Aswaja Pressindo.
- Sumarni, S., & Yakub, E. (n.d.). Menyelisik Penampilan Pendidik Dari Kaca Mata Siswa Dalam Pemberian Layanan Psikologis Dengan Konseling. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 85–100.
- Susilowati, S., & Suryadi, A. (2025). STRATEGIC GUIDANCE AND COUNSELING INTERVENTIONS TO OVERCOME LEARNING BARRIERS, A CASE STUDY AT SMP NEGERI 178 JAKARTA. *Multidisciplinary Research Studies in Social Sciences*, 1(1), 18-29.
- Syahri, L. M. (2024). Urgensi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Jurnal Jubikops*.
- Prayitno, & Amti, E. (2015). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zamroni, E., & Rahardjo, S. (2015). Manajemen bimbingan dan konseling berbasis permendikbud nomor 111 tahun 2014. *Jurnal konseling gusjigang*, 1(1), 0-11.
- Harini, H. (2018). Kepemimpinan dan kepercayaan (trust) terhadap komitmen organisasi pada guru bimbingan dan konseling di SMP. *Indonesian journal of educational counseling*, 2(2), 197-204.
- Sinaga, M. H. P., Qurrata, K., & Andini, V. (2022). Pola pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling di sekolah menengah atas. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(1), 110-116.
- Hidayat, W., Suryana, Y., & Fauziah, F. (2020). Manajemen bimbingan dan konseling dalam pendidikan karakter peserta didik. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 14(2), 346.
- Neviyarni, S. (2023). *Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah: Konsep, masalah, dan solusi*. Prenada Media.
- Rohmah, R. (2019). Urgensi manajemen bimbingan konseling dalam melahirkan peserta didik berkarakter. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 102-115.